

## **Pengaruh tingkat kekayaan dan tingkat ketergantungan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah**

**Parassela Pangestu Primadiva\*; Dini Rosdini; Sri Mulyani**

Prodi Magsiter Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran

*\*E-mail korespondensi: Pprimadivaa@gmail.com*

### **Abstract**

*This research discusses level of wealth and level of central dependence on local governments in West Java Province within the fiscal year of 2018 and 2019. Performance was measured using the Sustainable Development Goals indicator. The population of the research was all local governments in West Java Province. The sampling technique used was saturated sampling method or census. The sample in this research were 27 district/city governments in West Java Province. Based on the results of SPSS statistical analysis with multiple linear regression, it can be concluded that the level of local wealth and the level of central dependence have a significant effect on the performance of local governments.*

---

**Keywords :** *Level of wealth, Level of central dependence, Sustainable development goals, Local government performance*

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh tingkat kekayaan dan tingkat ketergantungan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2018-2019. Metode pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator *Sustainable Development Goals*. Penelitian ini menggunakan populasi semua pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat. Teknik pengambilan sampel dengan metode sampling jenuh atau sensus. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 27 pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil olah statistik SPSS dengan regresi linear berganda dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa tingkat kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

---

**Kata kunci:** *Tingkat kekayaan, Tingkat ketergantungan, Sustainable development goals, kinerja pemerintah daerah*

### **PENDAHULUAN**

Sejak diberlakukannya otonomi daerah maka pemerintah pusat melimpahkan otoritas kepada pemda secara mandiri untuk dapat mengelola urusan pemerintah sesuai asas otonomi berdasarkan undang-undang otonomi daerah yang memiliki tujuan untuk menjadikan tiap-tiap daerah menjadi lebih maju, mandiri, sejahtera dan mampu memaksimalkan pelaksanaan pemerintahan daerah dengan sebaik mungkin guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Novianti & Kiswanto, 2016).

Berhasilnya otonomi daerah dapat dilihat melalui hasil kerja pemda saat mengolah keuangan didaerahnya. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara ekonomis, efisien

dan efektif. Pertumbuhan ekonomi dan kemandirian suatu daerah perlu didorong dengan adanya partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan untuk membentuk suatu kinerja keuangan yang baik sehingga daerah tersebut mampu untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah (Khikmah, 2014).

Pengelolaan organisasi dan pengelolaan keuangan menjadi isu yang sangat penting saat ini terutama di organisasi pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan memudahkan daerah dalam memetakan dan mengalokasikan prioritas pembangunan daerah sehingga kinerja daerah bisa meningkat secara signifikan. Salah satu indikator untuk melihat kinerja pemerintah daerah adalah berdasarkan nilai skor kinerja yang dihasilkan atas laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD). (Ahyaruddin dan Amrillah, 2018).

Berhubungan dengan kinerja, di Indonesia sedang di populerkan dengan program pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Suatu proses menuju kearah perubahan yang lebih baik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang terdistribusi secara adil dan merata. Saat ini ada 19 provinsi yang telah memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk SDGs tersebut, salah satunya adalah Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah diwajibkan untuk menyusun RAD TPB lima tahun kedepan bersama Bupati dan Walikota dengan melibatkan seluruh *stakeholders*, termasuk akademisi. RAD TPB/SDGS berisikan rencana pelaksanaan pencapaian target TPB/SDGs yang sejalan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan telah dirinci pencapaian tahunannya. Adapun program unggulan dari Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 sebagai berikut: 1).Meningkatkan akses pendidikan untuk semua, 2).Desentralisasi pelayanan Kesehatan, 3).Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, 4).Mengembangkan destinasi dan infrastruktur pariwisata, 5).Mewujudkan pesantren juara, 6).Meningkatkan infrastruktur konektivitas wilayah, 7).Gerakan membangun desa, 8).Memberikan subsidi gratis untuk golongan ekonomi lemah, 9).Meningkatkan inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

Dari gambaran kondisi diatas, pemerintah masih punya pekerjaan rumah dalam yaitu bagaimana mengurangi “gap” antara penduduk perdesaan dan perkotaan. Pemerintah harus bisa mengendalikan stabilitas harga, khususnya harga kebutuhan pokok sehingga kemampuan daya beli masyarakat bisa tetap terjaga.

Struktur dalam penelitian ini menjelaskan mengenai pengaruh Tingkat Kekayaan dan Tingkat Ketergantungan Daerah. Bagian selanjutnya menyajikan uraian singkat mengenai literatur yang digunakan, serta konseptualisasi mengenai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Selanjutnya dibahas pula mengenai metodologi penelitian yang digunakan. Setelah membahas mengenai metodologi, selanjutnya disajikan hasil dan pembahasannya. Pada bagian terakhir dibahas mengenai dan kesimpulan serta batasan dalam penelitian ini.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori agency

Pertama kali teori agensi diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling sebagai gambaran hubungan kerja antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Fungsi pemilik dengan agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik.

Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar *agency theory*, diakui atau tidak di pemerintahan daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan (Halim,

2007). Lane (2000) mengungkapkan bahwa teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik, Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Hal yang sama dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan konsep ekonomis organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. Bergman dan Lane (1990) dalam Setiawan (2012) menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal agen merupakan satu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik.

Teori keagenan memandang bahwa adanya penyimpangan dari pemerintah daerah yang mengutamakan *conflict of interest* yaitu bertindak dengan penuh kesadaran untuk kepentingan mereka sendiri serta pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Terjadinya *conflict of interest* yang dilakukan oleh agent (pemerintah pusat) disebabkan karena adanya *information asymmetry* yaitu kondisi dimana agent (pemerintah daerah) memiliki akses informasi yang lebih unggul dibandingkan dengan prinsipal (masyarakat) inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen (pemerintah pusat). Dalam meminimalisir terjadinya *information asymmetry* pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya dengan mekanisme *checks and balances* sehingga informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang artinya *informatif asymmetry* dan meminimalisir terjadinya penyelewengan atau korupsi (Setiawan, 2012).

### **Tingkat kekayaan daerah**

Tingkat kekayaan daerah dicerminkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Jumlah kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah. Menguji tingkat kekayaan daerah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, semakin tinggi tingkat kekayaan daerah maka akan semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah dan juga sebaliknya (Novianti dan Kiswanto, 2016).

### **Tingkat ketergantungan pada pusat**

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dilihat dari penerimaan Dana Alokasi Umum. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

### **Kinerja pemerintah daerah**

Menurut Mahsun (2006) kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategis planning* suatu organisasi.

Menurut Robertson (2002) pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Proses penilaian meliputi : informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa

baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

***Sustainable development goals (SDGs)***

Mengacu pada dokumen yang ada, SDGs merupakan visi global yang ingin dicapai pada tahun 2030. (ODI, 2015; Sachs, 2015; UN, 2015). SDGs pada dasarnya merupakan pengembangan dari MDGs, yang beberapa tujuannya masih digunakan, dengan penambahan dari 8 tujuan pada MDGs menjadi 17 tujuan. Target pada SDGs juga lebih besar yaitu sebanyak 169 target dan 230 indikator, dibandingkan dengan MDGs yang hanya terdiri dari 18 target dan 60 indikator.

Dengan demikian diharapkan bahwa bumi dapat menjadi tempat hidup kita yang memberikan berbagai kebutuhan hidup yang lebih baik secara berkelanjutan. SDGs memandatkan untuk pencapaiannya di tahun 2030 bagi seluruh negara di dunia. Prinsip “*No left one behind*” atau tidak ada yang tertinggal dalam pencapaiannya menjadi suatu tantangan yang cukup besar, sehingga perlu dikembangkan prinsip-prinsip pendanaan yang dapat mencakup seluruh negara di dunia baik negara berkembang maupun negara maju tanpa pengecualian.

Tim penyusun indikator global SDGs, IAEG-SDGs, secara resmi menyepakati adanya 241 indikator global di mana 11 di antaranya adalah indikator yang sama untuk target yang berbeda sehingga sejumlah 230 indikator terpilih untuk SDGs di Indonesia. Dalam penelitian Arief Anshory et al, 2018 terdapat 15 tujuan yang relevan dengan pembangunan daerah. Penelitian ini hanya menggunakan 23 indikator terpilih atau sekitar 51% dari Indikator yang sudah dijelaskan diatas. Adapun target yang di dapat oleh peneliti yang dapat dijadikan basis penilaian indikator pada Lampiran 1.

Indikator SDGs dapat dinilai dengan analisis horizontal yaitu perhitungan hasil proyeksi baseline indikator SDGs pada beberapa periode tahun penelitian sehingga akan diketahui perkembangan *progress* setiap tahun. Penilaian tersebut terbagi menjadi lima klasifikasi *scorecard* yang tertera dibawah berikut :

**Tabel 2.** Sistem penilaian *scorecard* SDGs Tahun 2030

<b>A</b>	<b>Mencapai atau hampir mencapai target SDGs.</b> Asumsi <i>business as usual</i> , hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2030 indikator mencapai atau hampir mencapai 97,5% target SDGs
<b>B</b>	<b>Mendekati target SDGs.</b> Asumsi <i>business as usual</i> , hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2030 indikator mendekati target SDGs dan mencapai setidaknya 90% target SDGs
<b>C</b>	<b>Masih seperempat jalan lagi menuju target SDGs.</b> Asumsi <i>business as usual</i> , hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2030 indikator mengarah kepada target SDGs dan mencapai setidaknya 75% target SDGs.
<b>D</b>	<b>Baru setengah jalan menuju target SDGs.</b> Asumsi <i>business as usual</i> , hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2030 indikator mengarah kepada target SDGs dan mencapai setidaknya 50% target SDGs.
<b>E</b>	<b>Masih cukup jauh mencapai target SDGs.</b> Asumsi <i>business as usual</i> , hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2030 indikator tersebut masih kurang dari 50% target SDGs.

Sumber : *Seri menyongsong SDGs, Arief Anshory (2018).*

**Hubungan tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah**

Tingkat kekayaan daerah dicerminkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Jumlah kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah. Menguji hubungan tingkat kekayaan daerah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, maka peneliti menduga bahwa semakin tinggi tingkat kekayaan daerah maka akan semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah dan juga sebaliknya. Semakin rendah tingkat kekayaan daerah maka akan semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah.

H<sub>1</sub> : Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa barat.

### **Hubungan tingkat ketergantungan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah**

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dilihat dari penerimaan Dana Alokasi Umum. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah pusat akan memantau pelaksanaan alokasi DAU sehingga dapat mendorong pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kinerja keuangannya. Untuk menguji hubungan tingkat ketergantungan pada pusat dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, maka peneliti menduga bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan pada pusat maka akan semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah.

H<sub>2</sub> : Tingkat Ketergantungan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa barat.

## **METODE**

### **Jenis, sumber, populasi dan sampel penelitian.**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan penelitian Kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data data *numerical* (angka) yang diolah dengan metoda statistika. Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Selanjutnya dalam penelitian ini jenis yang digunakan adalah penelitian survey.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumen yang meliputi dari Laporan Keuangan. Adapun laporan keuangan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk mendapatkan PAD dan DAU Kabupaten/kota tahun 2018-2019 yang diakses melalui internet. Data skor kinerja pemda kabupaten/kota diperoleh dari 5 *Goals* SDGs yang terdiri dari 23 indikator.

Jumlah populasi yang ada pada penelitian ini relatif kecil, sampel yang berjumlah 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, maka metode yang digunakan dalam penarikan sampel adalah metode sampling jenuh atau sensus. Metode sampling jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan data runtun waktu (*time series*) selama 2 tahun yaitu tahun 2018-2019 dengan data penelitian sebanyak 54 data, dimana jumlah data

tersebut diperoleh dengan rumus :  $N = \text{Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat} \times \text{Periode Penelitian (tahun)}$ .  $N = 27 \times 2 = 54$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Lampiran 1, hasil uji t diketahui bahwa tingkat kekayaan daerah ( $X_1$ ) memiliki nilai *Standardized Coefecient/Beta* 0,630 dan nilai sig 0,06. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai sig lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  yang berbunyi tidak ada pengaruh signifikan tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah ditolak dan  $H_a$  yang berbunyi ada pengaruh signifikan tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah diterima. Tingkat ketergantungan daerah ( $X_2$ ) memiliki nilai *Standardized Coefecient/Beta* 0,566 dan nilai sig 0,012. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai sig lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  yang berbunyi tidak ada pengaruh signifikan tingkat ketergantungan pada pusat terhadap kinerja pemerintah daerah ditolak dan  $H_a$  yang berbunyi ada pengaruh signifikan tingkat kekayaan daerah pada pusat terhadap kinerja pemerintah daerah diterima.

Berdasarkan Lampiran 2, hasil uji F diketahui bahwa nilai Sig. 0,019 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kekayaan dan Tingkat Ketergantungan Daerah pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah diterima.

### **Pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah**

Tingkat kekayaan daerah dicerminkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Jumlah kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah.

Hasil analisis regresi linear berganda, variabel tingkat kekayaan daerah menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah memiliki nilai *Standardized Coefecient/Beta* adalah 0,630 dan nilai sig 0,06. Hasil tersebut menunjukkan bahwa signifikansi lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya bahwa variabel tingkat kekayaan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nugroho dan Prasetyo (2018), Harumiati dan Payamta (2014) dan Mustikarini dan Fitriasaki (2012) yang menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan Provinsi Jawa Barat memiliki pertumbuhan yang positif untuk mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD pemda tersebut. Peningkatan PAD seharusnya didukung dengan peningkatan kualitas layanan publik. Dimana kualitas layanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja yang baik suatu pemda.

### **Pengaruh tingkat ketergantungan pada pusat terhadap kinerja pemerintah daerah**

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dilihat dari penerimaan Dana Alokasi Umum. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Hasil analisis regresi linear berganda, variabel tingkat ketergantungan pada pusat menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat memiliki nilai *Standardized Coeficient/Beta* adalah 0,566 dan nilai sig 0,012. Hasil tersebut menunjukkan bahwa signifikansi lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya bahwa variabel tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Noviyanti dan Kiswanto (2016) dan Mustikarini dan Fitriasaki (2012) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat terlihat pada DAU yang memiliki peranan dominan dari dana lain untuk mengoptimalkan guna mempercepat pembangunan daerah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pengujian tingkat kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah yang diuji dengan menggunakan regresi linear berganda menunjukkan hasil bahwa tingkat kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Pada hasil pengujian dari keempat variabel independent, menunjukkan bahwa secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini dilakukan pada masa Pandemi Covid-19 sehingga banyak keterbatasan. Pertama, untuk skor kinerja pemerintah daerah hanya menggunakan penilaian 5 dari 17 tujuan SDGs saja, dikarenakan ketersediaan waktu meneliti. Kedua dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat terdapat 1 kabupaten yang tidak tersedia datanya yaitu: kabupaten pangandaran, untuk itu harapan peneliti kedepannya dapat memperluas sampel penelitian. Ketiga, sebaiknya menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, yang belum dimasukkan dalam model penelitian ini seperti lokasi daerah, jumlah SKPD, umur administratif dan variabel-variabel yang lain. Selain itu, bisa juga menggunakan indikator kinerja kunci (IKK) yang digunakan oleh pemerintah pusat sebagai dasar untuk penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anjani, E. S. D., Akram, & Lilik, H. (2016). Faktor penentu belanja modal dan konsekuensinya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat. *InFrestasi (Universitas Trunojoyo)*, 11 (1): 21-40.
- Badan Pusat Statistik. (2016). Potret awal tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) di Indonesia. diakses dalam <http://bps.go.id>, Tanggal 12 Juli 2020
- Badjra, I. B., Mustanda, I. K., & Abudanti, N. (2017). Kontribusi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal dan kinerja keuangan daerah Provinsi Bali. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1), 29-40 <https://doi.org/10.30659/jai.6.1.29-40>
- Fauzi, A., & Oxtavianus, A. (2014). Pengukuran pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 30(1), 42. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v30i1.445>
- Gamayuni, R. R. (2016). *The effect of local government characteristics and the*

- examination result of indonesian supreme audit institution on economic growth , with financial performance as intervening variable in District and City Government of Lampung Province. Research Journal of Finance and Accounting, 7(18), 75–81.*
- Ghozali, Imam. (2014). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan UNDIP : Semarang.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi sektor publik : akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat: Jakarta
- Hamzah, Ardi. (2008). Analisis kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan : pendekatan analisis jalur (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2001-2006) *Simposium Nasional Akuntansi XI. Hal 1-26*
- Harliyani, E. M., & Haryadi. (2016). *Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jambi. 3(3), 129–140.*
- Harumiati, Y., & Payamta, P. (2014). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit bpk terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2011. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan, 3(2), 75-87.* <https://doi.org/10.25273/jap.v3i2.1244>
- Indonesia, D. D. N. R. (2006). Peraturan menteri dalam negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- Jauhar, F. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Akuntansi, 3(1), 41–67.*
- Jensen, M. ., & Meckling, W. . (1976). Theory of the firm managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics. 3(1976), 305-360*
- Khikmah, A. (2014). Pengukuran kinerja pemerintah daerah Kabupaten lamongan berdasarkan konsep value for money. *Jurnal Akuntansi AKUNESA, 3(1). 24-48*
- Lane, Jan-Erik. (2000). *The public secto – concepts, models and approaches*. SAGE Publications: London
- Mangkunegara, I. (2015). Pengaruh karakteristik keuangan dan hasil pemeriksaan pada kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, 1(2), 141.* <https://doi.org/10.28986/jtaken.v1i2.24>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Andi Offset: Yogyakarta
- Mappiasse, A. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja keuangan. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA), 1(2), 51-55.* <https://doi.org/https://doi.org/10.37888/bjra.v1i2.86>
- Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja keuangan. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA), 1(2), 51–55.* <https://doi.org/10.37888/bjra.v1i2.86>
- Mahsun, Mohammad. (2006). *Pengukuran kinerja sektor publik: Cetakan Pertama BPFE Yogyakarta : Yogyakarta.*
- Martani, D., & Liestiani, A. (2012). *Disclosure of Local Government Financial*. diakses dalam <https://staff.blog.ui.ac.id/> Tanggal 12 Juli 2020, Pukul 10.00 WIB
- Moe, T. M. (1984). The new economics of organization. *American Journal of Political Science, 28(4), 739.* doi:10.2307/2110997
- Mustikarini, W. A., & Fitriarsi, D. (2012). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2007. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XV Banjarmasin, (32),*



1–23.

- Nørreklit, H. (2000). The balance on the balanced scorecard - A critical analysis of some of its assumptions. *Management Accounting Research*, 11(1), 65–88. <https://doi.org/10.1006/mare.1999.0121>
- Novianti, N. A., & Kiswanto. (2016). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah, temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1).1-10
- Nugroho, T. R., & Prasetyo, N. E. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di jawa timur. *ASEETS Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 7 (April), 27–34.
- Presiden Republik Indonesia. (2000a). Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Presiden Republik Indonesia. (2000b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Presiden Republik Indonesia. (2004a). *Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*
- Presiden Republik Indonesia. (2004b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara*, 1–25.
- Presiden Republik Indonesia. (2004c). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*.
- Presiden Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan keuangan daerah.
- Presiden Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.
- Presiden Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, 1–30.
- Presiden Republik Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, 1–10. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173>
- Sachs, J. D. (2015). *The Age of sustainable development*. International growth centre London School of Economics: London
- Setiawan, W. (2012). *Pengaruh akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah ( LKPD ) Pemerintah Daerah di Indonesia*. Universitas Diponegoro.
- Setiyawati, A., & Hamzah, A. (2007). Analisis pengaruh PAD, DAU, DAK, dan belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran: pendekatan analisis jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211–228.

**Lampiran 1.** Metadata *sustainable development goals*

Indikator SDGs	Target		Sumber	Metadata (sumber : Kesiapan Jabar, Arief Anshory 2018)
	2017	2018		
1.1 Penduduk Miskin dengan Garis Kemiskinan \$1.90 per hari (%)	*	*	UN	Persentase penduduk yang hidup kurang dari US\$1,90 per hari yang dihitung dengan penyesuaian US \$ dollar terhadap rupiah, yaitu sebesar Rp. 4.091 per 1 US dollar.
1.2 Penduduk miskin dengan Garis Kemiskinan Nasional (%)	7.97	7.17	RPJMD	Presentase Penduduk Miskin = Jumlah Penduduk Miskin di bawah Garis Kemiskinan Nasional/Jumlah Penduduk x 100%
3.1 Angka kematian dibawah 5 tahun (per 1.000 Kelahiran Hidup)	25		UN	$AKB\alpha = JK < 5th / JLH \times 1.000$
3.2 Angka kematian Neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	12		UN	$AKN = JK < 28hr / JLH \times 1.000$
3.3 Angka harapan hidup saat lahir (tahun)	72.77-72.96	72.97-73.00		Perkiraan rata-rata lamanya hidup yang akan dicapai seseorang ketika mereka lahir, dengan asumsi tingkat mortalitas terus berlaku
3.4 Jumlah korban kecelakaan lalu lintas (per 100.000 penduduk)	1/2 dari data terakhir		UN, WHO	Jumlah korban kecelakaan Lalu Lintas/Jumlah Penduduk x 100.000
3.5 Penduduk dengan kebiasaan merokok tiap hari di atas usia 15 tahun (%)	3/4 dari data terakhir		UN, WHO	$\%M \geq 15 = (JP \geq 15M) / (JP \geq 15) \times 100\%$
4.1 Rata-rata lama sekolah penduduk umur > 15 tahun (%)	8.00 - 8.10	8.11 - 8.20	UN, WHO	$MYS = 1 / (P15+) + \sum_{i=1} (Lama\ sekolah\ penduduk\ ke-i)$
4.2 Angka partisipasi murni (APM) tingkat sekolah dasar (%)	94.5	95	RPJMD	$APM\ SD = (JMSD\ 7-12) / (JP\ 7-12) \times 100\%$
4.3 Penduduk usia 25-64 tahun dengan pendidikan menengah atas (%)	39.3			Perbandingan antara jumlah penduduk usia 25-64 tahun yang telah mendapatkan pendidikan menengah atas dengan total penduduk usia 25-64 tahun.
4.4 Gap Top 10-Bottom 40 (T10B40) Penduduk usia 25-64 tahun dengan pendidikan teriser (%)	*	*		Selisih dari persentase penduduk usia 25-64 tahun dengan pendidikan tersier yang termasuk ke dalam kelompok masyarakat berpendapatan 10% tertinggi (Top 10), dengan persentase penduduk usia 25-64 tahun dengan pendidikan tersier yang termasuk ke dalam kelompok masyarakat berpendapatan 40% terbawah (Bottom 40).
4.5 Gap Top 10-Bottom 40 (T10B40) Partisipasi murni SMA (%)	*	*		Selisih dari angka partisipasi murni SMA penduduk yang termasuk ke dalam kelompok masyarakat berpendapatan 10% tertinggi (Top 10), dengan angka partisipasi murni SMA penduduk yang termasuk ke dalam kelompok masyarakat berpendapatan 40% terbawah (Bottom 40).
4.6 Gap Top 10-Bottom 40 (T10B40) Penduduk Usia 25-64 tahun SMA (%)	*	*		Selisih dari persentase penduduk usia 25-64 tahun dengan pendidikan SMA yang termasuk ke dalam kelompok masyarakat berpendapatan 10% tertinggi (Top 10), dengan persentase penduduk usia 25-64 tahun dengan pendidikan SMA yang termasuk ke dalam kelompok masyarakat berpendapatan 40% terbawah (Bottom 40).

4.7 Gender Gap Penduduk Usia 25-64 tahun SMA (%)	*	*		Selisih dari persentase penduduk laki-laki usia 25-64 tahun dengan pendidikan SMA, dengan persentase penduduk perempuan usia 25-64 tahun dengan pendidikan SMA.
4.8 Gender Gap Penduduk Usia 25-64 tahun dengan pendidikan tersier (%)	*	*		Selisih dari persentase penduduk laki-laki usia 25-64 tahun dengan pendidikan tersier, dengan persentase penduduk perempuan usia 25-64 tahun dengan pendidikan tersier.
4.9 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (%)	22	25	RPJMD	$APK\ PT = \frac{JMPT}{JP\ 19-23} \times 100\%$
4.10 Angka Melek Huruf Usia 15-24 (%)	89	99,5	RPJMD	$PAMH\ 15-24 = \frac{JAMH\ 15-24}{JP\ 15-24} \times 100\%$
8.1 PDRB per Kapita (Harga Konstan 2016, juta rupiah)	26.00-28.00	28.00-30.00		$PDRB\ per\ kapita = \frac{PDRB}{\sum\ Penduduk} \times 100\%$
8.2 Tingkat pengangguran dengan kriteria jam kerja <35 (%)	1/2 dari data terakhir		UN, WHO	Tingkat Setengah Pengangguran = $A/AK \times 100\%$
8.3 Penduduk usia muda yang tidak bekerja, tidak sekolah dan tidak pelatihan (%)	1/2 dari data terakhir		UN, WHO	$NEET = \frac{T(S,B,T)}{\text{Jumlah penduduk usia 15-24 tahun}} \times 100\%$
8.4 Penduduk usia 5-14 tahun yang termasuk ke dalam kategori pekerja anak	519 orang	508 orang		Persentase dari penduduk usia 5-14 tahun yang termasuk ke dalam kategori pekerja anak diperoleh dengan membagi jumlah anak usia 5-14 tahun yang tercatat merupakan pekerja anak pada seminggu terakhir terhadap jumlah populasi anak umur 5-17 tahun.
9.1 Kondisi mantap jalan kabupaten/kota	98.15-98.25%	98.50-98.60%		$KMJK = \frac{PJK}{TPJK} \times 100\%$
9.2 Rumah tangga yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir (%)	59.5			Jumlah Rumah Tangga yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir di Daerah Tertentu / Total Rumah Tangga pada di Daerah Tertentu x 100%

## Lampiran 2. Koefisien

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,297	,433		2,999	,004		
	tingkat kekayaan x2	1,597	,553	,630	2,890	,006	,366	2,735
	tingkat ketergantungan x3	2,254	,868	,566	2,596	,012	,366	2,735

a. Dependent Variable: kinerja keuangan pemerintah daerah y

## Lampiran 3. Hasil regresi

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,633	2	,316	4,295	,019 <sup>b</sup>
	Residual	3,611	49	,074		
	Total	4,244	51			

a. Dependent Variable: kinerja keuangan pemerintah daerah y

b. Predictors: (Constant), tingkat ketergantungan x3, tingkat kekayaan x2